

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan masalah utama yang ingin dituntaskan oleh berbagai negara di seluruh dunia. Negara Indonesia yang merupakan negara berkembang berusaha untuk menurunkan kemiskinan. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dilaksanakan secara terpadu. Pengentasan kemiskinan akan menjadi salah satu indikator penting dari keberhasilan pembangunan.

Kemiskinan juga membuat jutaan anak-anak bangsa tidak bisa melanjutkan pendidikan yang berkualitas, kurangnya kesempatan menatap dan berinvestasi, kesulitan membiayai kehidupan sehari-hari, kesulitan dalam membiayai kesehatan, kurangnya lapangan pekerjaan, ketidakmampuan dalam membeli pangan dan sandang, dan kurangnya akses layanan publik. Kemiskinan juga menyebabkan masyarakat mengorbankan apa saja demi sebuah kebutuhan hidup sehingga masyarakat rela dibayar tidak sepadan demi mendapatkan pendapatan untuk kebutuhan hidup. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa pembangunan nasional adalah salah satu upaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Sejalan dengan tujuan tersebut, berbagai kegiatan pembangunan telah diarahkan kepada pembangunan daerah khususnya daerah yang relatif miskin terus dari tahun ke tahun. Pembangunan daerah dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan dasar dan sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan melalui pembangunan jangka panjang dan jangka pendek.

Pemerintah mengalokasikan dana untuk peningkatan pelayanan tersebut dalam bentuk alokasi belanja daerah yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Sumber-sumber keuangan utama daerah yang digunakan untuk membiayai belanja daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu berupa pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Ini merupakan titik awal berjalannya otonomi daerah. Dengan kebijakan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menciptakan pendapatannya serta melakukan alokasi untuk prioritas pembangunan di daerahnya secara mandiri dan diharapkan dapat lebih meratakan pembangunan sesuai dengan potensi dan aspirasi lokal untuk mengembangkan wilayah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat diharapkan juga turut berperan menjadi subjek pembangunan, bukan hanya menjadi objek pembangunan, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan suatu daerah dan juga kemajuan nasional.

Akar permasalahan kemiskinan kaitannya dengan jumlah penduduk yang tinggi adalah keberadaan lapangan pekerjaan yang tidak bisa menampung kebutuhan angkatan kerja, sehingga terciptalah pengangguran yang berujung pada kemiskinan. Pengangguran adalah jumlah tenaga kerja dalam perekonomian yang aktif mencari pekerjaan tetapi belum memperolehnya. Pengangguran adalah masalah makro ekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan masalah yang paling berat. Salah satu unsur yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatan. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila kondisi tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (full employment) dapat terwujud, jika tidak maka akan terjadi pengangguran. Efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi tingkat pendapatan masyarakat dan dengan demikian akan memberikan dampak domino mengurangi tingkat kemakmuran. Semakin turun tingkat kemakmuran masyarakat karena pengangguran

tentunya akan meningkatkan peluang masyarakat dalam kemiskinan dan akan menimbulkan masalah lain yaitu kekacauan politik dan sosial.

Permasalahan kemiskinan di Indonesia dipengaruhi beberapa faktor. Faktor itu diantaranya Indeks Pembangunan Manusia yang rendah, meningkatnya jumlah pengangguran, inflasi yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang rendah. Pembangunan manusia dapat dilakukan dengan melakukan investasi pada bidang-bidang seperti pendidikan dan kesehatan diharapkan mampu meningkatkan produktivitas yang dibarengi dengan meningkatnya pendapatan. Kualitas sumber daya manusia dapat diketahui dengan melihat indeks kualitas hidup atau indeks pembangunan manusia. Rendahnya indeks pembangunan manusia akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja seseorang. Produktivitas yang rendah berdampak pada pendapatan dan mengakibatkan jumlah kemiskinan bertambah.

Permasalahan kemiskinan dipengaruhi beberapa faktor. Faktor itu diantaranya Belanja Daerah, meningkatnya jumlah pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang rendah. Untuk mengatasi kemiskinan salah satu kebijakan pemerintah adalah pembangunan daerah dilakukan pemerintah di berbagai wilayah Indonesia, baik secara provinsi, kabupaten/kota, kecamatan maupun desa seluruh Indonesia. Salah satunya adalah Kabupaten Labuhanbatu yang terletak di provinsi Sumatera Utara.

Kabupaten Labuhanbatu merupakan salah satu kabupaten yang menjadi sentral perputaran ekonomi dan sedang terjadi kenaikan pembangunan. Perlu kita ketahui bahwa pada tahun 2008 pemekaran terjadi di kabupaten labuhanbatu, yaitu melalui pembentukan [Kabupaten Labuhanbatu Utara](#) dan [Kabupaten Labuhanbatu Selatan](#). Alasan dilakukannya pemekaran ini ialah Komitmen bersama untuk mensejahterakan masyarakat, tidak hanya mimpi bagi warga yang terbelakang di daerah tersebut. Dan, sebagai jawaban sisi positif pemekaran Labuhanbatu

yang diharapkan mampu pemeratakan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan. Dengan adanya pemekaran maka pemerintah pada setiap kabupaten lebih mudah untuk melakukan pemerataan pembangunan pada masing-masing kabupaten.

Sesuai wacana yang berkembang, rencana pemekaran wilayah, khususnya menjadikan wilayah pesisir sebagai Kabupaten Labuhanbatu dengan rencana menjadikan Negeri Lama sebagai Ibukota Labuhanbatu. Memang, menurut sejarah berdirinya kabupaten Labuhanbatu, asal kata daerah itu sendiri berawal dari adanya Pelabuhan Batu di kawasan Panai Tengah. Dokumentasi daerah yang ada menyatakan itu berasal dari adanya tempat penyandaran kapal-kapal yang berlabuh ketika itu. Dan, sejak itu Pelabuhan Batu lebih akrab disebut sebagai Labuhanbatu.

Dalam hal perkembangan kemiskinan, Labuhanbatu dalam kurun waktu ke waktu secara absolut terjadi penurunan. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.1. berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin, Belanja Daerah, Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2011-2017

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Belanja Daerah (Milyaran Rupiah)	Pengangguran (Jiwa)	IPM (%)
2011	42.610	683.262.483.975	11.835	67,88
2012	41.310	710.270.437.971	12.897	68,64
2013	38.140	827.146.775.027	17.025	69,45
2014	37.350	967.097.870.357	14.682	70,06
2015	41.630	1.121.966.245.591	20.999	70,23
2016	41.940	1.276.600.439.436	23.512	70,50

2017	41.980	1.391.675.322.792	24.632	70,64
------	--------	-------------------	--------	-------

Sumber : BPS Labuhanbatu

Berdasarkan Tabel 1.1, menunjukkan jumlah penduduk miskin Labuhanbatu di tahun 2011-2014 mengalami penurunan. Pada tahun 2011 tercatat sebanyak 42.610 jiwa dan terus menurun sampai tahun 2014 sebanyak 37.350 jiwa. Dan jumlah pengangguran tahun 2011-2013 mengalami peningkatan, tahun 2011 jumlah pengangguran sebanyak 11.835 jiwa dan meningkat hingga tahun 2013 sebanyak 17.025 jiwa. Namun kembali menurun di tahun 2014 menjadi 14.682 jiwa. Fenomena ini terjadi karena tingginya mobilitas penduduk pada daerah tersebut, mengakibatkan turunnya laju pertumbuhan penduduk. Dengan menurunnya laju pertumbuhan penduduk berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan di Labuhanbatu. Namun jumlah penduduk miskin di tahun 2015 tercatat 41.630 jiwa dan terus mengalami peningkatan di tahun 2017 sebanyak 41.980 jiwa. Dan jumlah pengangguran tahun 2015 sebanyak 20.999 jiwa mengalami peningkatan hingga tahun 2017 sebanyak 24.632 jiwa. Fenomena ini terjadi karena adanya keterbatasan lapangan pekerjaan membuat banyak masyarakat Labuhanbatu yang tidak bekerja atau tidak memiliki pekerjaan yang biasa disebut sebagai [pengangguran](#). Pengangguran yang dialami oleh sebagian masyarakat inilah yang membuat mereka kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga angka kemiskinan selalu mengalami peningkatan. Karena apabila tingkat pengangguran naik, maka tingkat kemiskinan juga akan meningkat. Hal tersebut juga akibat dari dampak pengangguran di tahun 2014-2015 yang mengalami peningkatan. Dapat dilihat bahwa data pengangguran cenderung meningkat.

Dari Tabel 1.1 menunjukkan bahwa IPM Labuhanbatu setiap tahunnya mengalami peningkatan dari tahun 2011 sebanyak 67.88 % sampai 2014 sebanyak 70.06%. Hal ini karena pemerintah terlihat fokus membangun sumber daya manusia (SDM), selain meneruskan

komitmen pembangunan infrastruktur fisik di dalam negeri. Target peningkatan itu akan dicapai melalui berbagai program perlindungan sosial. Namun jumlah penduduk miskin pada tahun 2011 sebanyak 42.610 jiwa mengalami penurunan hingga tahun 2014 sebanyak 37.350 jiwa, dan kembali lagi meningkat di tahun 2015 sebanyak 41.630 jiwa hingga tahun 2017 sebanyak 41.980 jiwa. "Indeks pembangunan manusia yang merupakan refleksi dari tingkat pembangunan kualitas manusia, memiliki peran yang sangat penting dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Pembangunan manusia seutuhnya baik dari aspek mental, fisik dan intelegensia merupakan modal dasar bagi suatu bangsa untuk lepas dari kemiskinan. IPM yang merupakan alat ukur bagi kualitas pembangunan manusia, menjadi variabel penting bagi suatu Negara dalam menentaskan kemiskinan".¹ Hal ini dapat dikatakan bahwa adanya dampak IPM terhadap kemiskinan di Labuhanbatu, sehingga dengan tingginya IPM maka produktivitas masyarakat akan tinggi, produktivitas masyarakat tinggi akan menurunkan jumlah penduduk miskin. Namun hal itu tidak memungkinkan terjadinya penurunan tingkat kemiskinan di Labuhanbatu di tahun 2015-2017, melainkan tingkat kemiskinan mengalami peningkatan.

Dari Tabel 1.1 menunjukkan bahwa Belanja Daerah Labuhanbatu dari tahun 2011 sebanyak 683.262.483.975 hingga tahun 2017 sebanyak 1.391.675.322.792 terus mengalami peningkatan. Hal ini didorong oleh adanya kegiatan strategis pemilihan umum, juga adanya percepatan pengadaan barang dan jasa untuk belanja operasional. Namun jumlah penduduk miskin pada tahun 2011 sebanyak 42.610 jiwa mengalami penurunan hingga tahun 2014 sebanyak 37.350 jiwa, hal ini diakibatkan jumlah anggaran belanja daerah meningkat, maka tingkat kemiskinan mengalami penurunan. Dan kembali lagi meningkat di tahun 2015 sebanyak 41.630 jiwa hingga tahun 2017 sebanyak 41.980 jiwa. "Dalam meningkatkan pertumbuhan

¹Yoghi Citra Pratama, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Indonesia", Dalam, **Jurnal Bisnis Dan Manajemen**, Vol. 4, No. 2, Agustus 2014, Hal, 212

ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan, maka pemerintah daerah hendaknya lebih bijak dalam mengalokasikan anggaran belanja modal dalam APBD nya karena besarnya anggaran tersebut dapat secara langsung mempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan secara tidak langsung mengurangi tingkat kemiskinan”.²Artinya dengan meningkatnya belanja daerah meringankan pemerintah dalam mengatasi jumlah penduduk miskin di Labuhanbatu. Namun hal ini tidak terjadi pada tingkat kemiskinan di tahun 2015-2017, melainkan tingkat kemiskinan mengalami peningkatan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk menganalisis bagaimana pengaruh Belanja Daerah, Pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap jumlah penduduk miskin di Labuhanbatu.

Oleh karena itu penulis melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pengaruh Belanja Daerah, Pengangguran, Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap jumlah penduduk miskin Di Labuhanbatu Tahun 2006-2017**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah:

²Santi Nurmainah,” Analisis Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah, Tenaga Kerja Terserap Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan (Studi Kasus 35 Kabupaten / Kota Di Provinsi Jawa Tengah)”, Dalam, **Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)**, Vol. 20 No.2, September 2013, Hal,140.

1. Apakah belanja daerah berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu?
2. Apakah pengangguran berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu?
3. Apakah indeks pembangunan manusia (IPM) berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh belanja daerah terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu.
2. Untuk menganalisis pengaruh pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu.
3. Untuk menganalisis pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan landasan serta wawasan bagi penulis sejauh mana keterkaitan antara belanja daerah, pengangguran, dan indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mengetahui bagaimana pengaruh belanja daerah, pengangguran, dan indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu.

3. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan akademik dan bahan pembandingan bagi peneliti selanjutnya.
4. Sebagai tambahan dan pelengkap bagi peneliti sebelumnya.
5. Sebagai salah satu sumber informasi tentang permasalahan perkembangan kemiskinan di Labuhanbatu.

BAB II

LANDASAN TEORETIS

2.1 Kemiskinan

2.1.1 Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan, dll.

Menurut Faisal Bahri :

“Kemiskinan diartikan sebagai akibat dari ketiadaan demokrasi, yang mencerminkan hubungan kekuasaan yang menghilangkan kemampuan warga suatu Negara untuk memutuskan masalah yang menjadi perhatian mereka sendiri, sehingga mayoritas penduduk kurang memperoleh alat-alat produksi (lahan dan teknologi) dan sumber daya (pendidikan, kredit, dan akses pasar)”³

Kemiskinan juga dapat kita sebut sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan yang bersifat mendasar. Penduduk miskin menurut definisinya adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Dimana, Garis Kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM)

2.1.2 penyebab kemiskinan

Terdapat tiga macam pendekatan yang menjelaskan mengenai sebab –sebab kemiskinan, yaitu :

a) System approach

yaitu pendekatan yang lebih menekankan pada adanya keterbatasan pada aspek-aspek geografi, ekologi, teknologi, dan demografi. Kondisi kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor tersebut dianggap lebih

³ Faisal Basri, *Perekonomian Indonesia, Tantangan Dan Harapan Bagi Kebangkitan Ekonomi Indoseia*, Jakarta : Erlangga, 2002, Hal. 98

banyak menekan warga masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan atau pedalaman.

b) *Decision-making model*

pendekatan ini menekankan pada kurangnya pengetahuan, keterampilan, dan keahlian sebagian warga masyarakat dalam merespon sumber-sumber daya ekonomi, baik yang berasal dari dalam maupun yang berasal dari luar. Dengan kata lain kemiskinan ini disebabkan karena kurangnya inovasi masyarakat untuk melakukan wirausaha, sehingga masyarakat hanya mengandalkan lapangan pekerjaan yang disediakan oleh orang lain dan pemerintah tanpa ada upaya untuk menciptakan lapangan kerja sendiri.

c) *Structural approach*

Pendekatan ini melihat bahwa kemiskinan itu terjadi karena ada ketimpangan dalam kepemilikan atas faktor produksi, seperti tanah, teknologi, produktivitas, dan bentuk kapital lainnya. Hal ini tercermin dengan adanya sekelompok kecil dari masyarakat yang justru menguasai modal dan perekonomian masyarakat secara lebih dominan, seperti para pengusaha raksasa, dan sebagainya.⁴

2.1.3 Ukuran Kemiskinan

Kemiskinan mempunyai pengertian yang luas dan tidak mudah untuk mengukurnya. Menurut Elvis F. Purba, Juliana L Tobing, Dame Esther Hutabarat menjelaskan kemiskinan dapat di bagi menjadi empat bentuk, yaitu :

1. **Kemiskinan absolut** adalah suatu konsep yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan tetapi pada ketidakmampuan pendapat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan minimum agar bisa bertahan hidup. Kebutuhan-kebutuhan yang dimaksud antara lain sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.
2. **Kemiskinan relatif** adalah suatu konsep yang mengacu pada garis kemiskinan (poverty line) yang sebenarnya merupakan suatu ukuran mengenai ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Kondisi ini disebabkan pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan dalam pendapatan.

⁴ Riana Puji Lestari, "Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran, Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2011-2015", Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017 (skripsi tidak diterbitkan), hal : 18-19

3. **Kemiskinan kultural** adalah suatu konsep yang mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, dan tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.
4. **Kemiskinan struktural** adalah suatu konsep kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya. Kemiskinan ini terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan.⁵

2.2 Belanja Pemerintah Pusat

Belanja Negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja Negara terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat, dan belanja pemerintah daerah.

“Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Belanja negara dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.”⁶

2.3 Belanja Daerah

2.3.1 Pengertian Belanja Daerah

Secara umum belanja daerah adalah perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Anggaran

⁵Elvis F. Purba, Juliana L Tobing, Dame Esther Hutabarat, **Ekonomi Indonesia**, Edisi Kedua, Cetakan Kedua, Medan : Universitas HKBP Nommensen, Tahun 2014, Hal. 75-76

pendapatan pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan APBD, dimana dalam penyusunan anggaran pendapatan mempunyai arti penting bagi pemerintah daerah dalam membantu kelancaran roda pembangunan dan memberikan isi dan arti kepada tanggung jawab pemerintah daerah khususnya sehingga tercipta perencanaan dan pelaksanaan yang efektif. Penyusunan anggaran pendapatan adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang seluruh kegiatan pemerintah atau instansi yang dinyatakan dalam unit moneter (nilai uang) untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang. Belanja daerah pada dasarnya merupakan fungsi dari penerimaan daerah.

APBD yaitu komprehensif dan mengaitkan pengeluaran-pengeluaran pemerintah daerah dengan pendapatan-pendapatan. Cirri lainnya yang penting dari APBD ialah bahwa anggaran daerah memuat semua perkiraan-perkiraan dalam suatu jangka (periode) tertentu dari semua pembiayaan yang diperlukan untuk keperluan pengeluaran, karena itulah anggaran daerah tidak dapat dipisahkan dengan program tahunan. Hal ini disebabkan karena anggaran daerah merupakan pelaksanaan program tahunan yang dinyatakan dalam bentuk uang.⁷

Belanja daerah merupakan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Belanja daerah yang teralokasi secara tepat ke pos-pos belanja yang dibutuhkan oleh masyarakat akan mendorong pertumbuhan yang positif dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Analisis belanja daerah dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara ekonomis, efisien dan efektif. Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Pemerintah daerah harus dapat mengendalikan belanja daerah, melakukan efisiensi belanja dan penghematan anggaran

⁷ Windhu Putra, **Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah**, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Depok : Rajawali Pers, Tahun 2018, Hal. 2

Penyelenggaraan pemerintah daerah tidak lepas dari adanya penggunaan dan pemanfaatan anggaran serta pendapatan daerah. Dan setiap tahun juga selalu saja pemerintah daerah mempersiapkan perencanaan anggaran atau yang sering disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Tahun anggaran APBD sama dengan tahun anggaran APBN yaitu mulai 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan. Sehingga pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan keuangan daerah dapat dilaksanakan berdasarkan kerangka waktu tersebut. APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat tercapai untuk setiap sumber pendapatan

Pendapatan dapat direalisasikan melebihi jumlah anggaran yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan belanja, jumlah belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja. Jadi, realisasi belanja tidak boleh melebihi jumlah anggaran belanja yang telah ditetapkan. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.

2.3.2 Tujuan APBD

APBD disusun sebagai pedoman pemerintah daerah dalam mengatur penerimaan serta belanja. Berikut beberapa tujuan APBD, di antaranya:

- 1. Membantu pemerintah daerah mencapai tujuan fiskal.**
- 2. Meningkatkan pengaturan atau juga kordinasi tiap bagian yang berada di lingkungan pemerintah daerah.**
- 3. Menciptakan efisiesnsi terhadap penyediaan barang dan jasa.**

4. Menciptakan prioritas belanja pemerintah daerah.⁸

Fungsi APBD antara lain:

- 1. Menentukan jumlah pajak yang dibebankan pada rakyat daerah yang bersangkutan.**
- 2. Merupakan suatu sarana untuk mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggungjawab.**
- 3. Memberi isi dan arti kepada tanggung jawab Pemerintah Daerah umumnya dan kepada daerah khususnya, karena APBD itu menggambarkan seluruh kebijakan Pemerintah Daerah.**
- 4. Merupakan suatu sarana untuk melaksanakan pengawasan terhadap daerah dengan cara yang lebih mudah dan berhasil guna.**
- 5. Merupakan suatu pemberian kuasa kepada Kepala Daerah didalam batas-batas tertentu.⁹**

2.3.3 Jenis –jenis belanja Daerah

Secara umum Belanja dalam APBD dikelompokkan menjadi lima kelompok yaitu:

a. Belanja Administrasi Umum

Belanja Administrasi Umum adalah semua pengeluaran pemerintah daerah yang tidak berhubungan dengan aktivitas atau pelayanan publik. Belanja administrasi umum terdiri atas empat jenis, yaitu:

1. Belanja Pegawai, merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk orang/personel yang tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas atau dengan kata lain merupakan biaya tetap pegawai.

⁸ Serafica Gischa, **APBD: Pengertian, Unsur, Jenis, Fungsi, Dan Tujuannya**, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/18/180000269/apbd--pengertian-unsur-jenis-fungsi-dan-tujuannya?page=all>, 2020. (Diakses 10 Maret 2020).

⁹Nining Yunia Artanti, “**Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)**” Yogyakarta : Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi Universitas sanata dharma yogyakarta, 2010, hal.12 (skripsi tidak diterbitkan).

2. Belanja Barang, merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk penyediaan barang dan jasa yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan publik.
3. Belanja Perjalanan Dinas, merupakan pengeluaran pemerintah untuk biaya perjalanan pegawai dan dewan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan publik.
4. Belanja Pemeliharaan, merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk pemeliharaan barang daerah yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan publik.

b. Belanja Operasi,

Pemeliharaan sarana dan Prasarana Publik Belanja ini merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah yang berhubungan dengan aktivitas atau pelayanan publik. Menurut Ana Mei Rafika belanja daerah dikelompokkan menjadi:

1. **Belanja Pegawai, merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk orang/personel yang berhubungan langsung dengan suatu aktivitas atau dengan kata lain merupakan belanja pegawai yang bersifat variabel.**
2. **Belanja Barang, merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk penyediaan barang dan jasa yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik.**
3. **Belanja Perjalanan, merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk biaya perjalanan pegawai yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik.**
4. **Belanja Pemeliharaan, merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk pemeliharaan barang daerah yang mempunyai hubungan langsung dengan pelayanan publik¹⁰**

c. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan. Belanja modal dibagi menjadi:

¹⁰Ana Mei Rafika, "Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Se-Indonesia" Lampung : Fakultas Ekonomi dan Bisnis universitas lampung, 2017 hal.27 (skripsi tidak diterbitkan).

1. Belanja Publik, yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum. Contoh belanja publik yaitu pembangunan jembatan dan jalan raya, pembelian alat transportasi massa, dan pembelian mobil ambulans.
2. Belanja aparatur, yaitu belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat akan tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur. Contoh belanja aparatur: pembelian kendaraan dinas, pembangunan gedung pemerintahan, dan pembangunan rumah dinas.

d. Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengalihan uang dari pemerintah daerah kepada pihak ketiga tanpa adanya harapan untuk mendapatkan pengembalian imbalan maupun keuntungan dari pengalihan uang tersebut. Kelompok belanja ini terdiri atas pembayaran:

1. Angsuran Pinjaman
2. Dana Bantuan
3. Dana Cadangan

e. Belanja Tak Tersangka

Belanja tak tersangka adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan tak terduga dan kejadian-kejadian luar biasa.

2.3.4 Hubungan Belanja Daerah Terhadap Kemiskinan

Penurunan jumlah kemiskinan merupakan salah satu program nasional yang harus segera dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Alokasi belanja yang baik tentunya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dapat dilihat dari indikator pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan. Angkakemiskinan biasanya juga

dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah. Alokasi belanja yang kurang tepat dan kurang optimal bisa menyebabkan bertambahnya angka kemiskinan.¹¹

Dari teori tersebut dikatakan bahwa adanya pengaruh antara pengeluaran pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan. Perlu diketahui pengeluaran pemerintah yang dimaksud adalah pengeluaran pemerintah pusat dan daerah. Artinya pengeluaran pemerintah dikatakan sebagai belanja negara atau belanja daerah. Dengan adanya belanja daerah, kiranya dapat meningkatkan kualitas hidup sumber daya manusia. Faktor pembangunan manusia atau peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan faktor terpenting yang mempengaruhi pembangunan dari suatu daerah. Perlu diketahui bahwa belanja daerah yang terdiri dari belanja modal, belanja barang dan jasa serta belanja pegawai merupakan bagian dari belanja yang mendukung kegiatan pembangunan salah satunya adalah upaya pengentasan kemiskinan.

Belanja daerah yang tinggi akan menurunkan tingkat kemiskinan karena penggunaan belanja tersebut untuk keperluan pembangunan baik itu berupa proyek maupun subsidi terhadap sektor pendidikan yang mana nantinya akan bermuara pada penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, dimana masyarakat akan memperoleh pendapatan dan kesempatan pendidikan dengan biaya murah.. Oleh karena itu dana untuk program tersebut tidak hanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tapi juga berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

2.4 Pengangguran

2.4.1 Pengertian Pengangguran

Pengangguran adalah sebuah golongan angkatan kerja yang belum melakukan suatu kegiatan yang menghasilkan uang. Pengangguran tidak terbatas pada orang yang belum

¹¹Dewi I, Spaulus, Rosalina A.M. Koleangan, Daisy S.M. Engka, Analisis Pengaruh Pad, Dau Dan Dak Terhadap Kemiskinan melalui Belanja Daerah di Kota Bitung,, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jpekd/article/view/15781>, Maret 2018, hal. 4

bekerja. Orang yang sedang mencari pekerjaan dan orang yang bekerja namun pekerjaannya tidak produktif pun dapat dikategorikan sebagai pengangguran. Pengertian pengangguran dalam arti luas adalah suatu penduduk yang tidak sedang bekerja, akan tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha baru, atau penduduk yang tidak sedang mencari kerja karena sudah diterima bekerja belum mulai bekerja.

Menurut Samuelson dan Nordhaus menyatakan bahwa

“pengangguran adalah kelompok yang terdiri dari orang-orang yang tidak bekerja namun masih aktif mencari kerja atau menunggu kesempatan kerja kembali. Agar terhitung sebagai pengangguran, seseorang harus melaporkan usaha spesifiknya dalam mencari pekerjaan (seperti melakukan wawancara kerja atau mengirim surat-surat lamaran)”.¹²

2.4.2 Jenis-jenis Pengangguran

Ada tiga jenis pengangguran yang berbeda, yaitu :

1. **Pengangguran friksional** adalah muncul karena pergerakan yang tak putus-putus dari orang-orang antara daerah dan pekerjaan atau melalui tingkatan yang berbeda dari perputaran hidup. Bahkan jika perekonomian dalam keadaan yang full employment, akan selalu terjadi pergantian seperti pada saat pelajar mencari pekerjaan ketika mereka lulus sekolah, atau ibu-ibu yang kembali kedalam angkatan tenaga kerja setelah melahirkan. Karena pekerja friksional yang menganggur sering berpindah pekerjaan, atau mencari pekerjaan yang lebih baik, mereka sering disebut penganggur voluntary.
2. **Pengangguran struktural** yaitu menandakan ketidaksebandingan antara penawaran dan permintaan pekerja. Ketidaksebandingan dapat terjadi karena permintaan atas satu jenis tenaga kerja meningkat, sedangkan permintaan untuk jenis lainnya menurun, dan penawaran tidak cepat menyesuaikan. Kita sering melihat ketidakseimbangan struktural pada pekerja atau daerah ketika sector tertentu berkembang dan sector lainnya menurun. Sebagai contoh, sangat kurangnya profesi perawat di pertengahan

¹² Paul A. Samuelson Dan William D. Nordhaus, **Ilmu Makroekonomi**, Edisi Tujuh Belas, Jakarta : P.T. Media Global Edukasi, Tahun 2004, hal 362

tahun 80 an muncul karena pertumbuhan jumlah perawat sangat kecil sedangkan permintaan bertambah cepat karena populasi lanjut usia dan lain-lainnya. Kekurangan struktural akan perawat menurun sebelum gaji perawat naik dengan cepat dan penawaran menyesuaikan. Sebaliknya, permintaan akan penambang batu bara sangat tertekan selama beberapa dekade karena kekurangan mobolitas geografik akan tenaga kerja dan modal, angka pengangguran pada komunitas penambang batu bara tetap tinggi hingga sekarang. Di Negara-negara Eropa, upah nyata yang tinggi, tunjangan kesejahteraan, dan pajak menciptakan tingkat pengangguran struktural yang tinggi pada keseluruhan perekonomian selama dekade terakhir.

3. Pengangguran cyclical yaitu terjadi karena keseluruhan permintaan tenaga kerja rendah. Ketika out put dan pengeluaran total menurun pengangguran meningkat di semua tempat. Pada tahun resesi 1982, angka pengangguran meningkat di 48 dan 50 negara. Kenaikan pengangguran secara serentak di bannyak pasar ini menandakan bahwa kenaikan pengangguran ini beredar secara lias. Sama hal nya dengan cela resesi di tahun 1991 hingga tahun ladakan 2000, angka pengangguran menurun di setiap negara bagian di Amerika.¹³

Perbedaan antara pengangguran cyclical, friksional, dan struktural membantu ahli ekonomi mendiagnosa kesehatan pasara tenaga kerja secara umum. Tingginya tingkat pengangguran friksional atau struktural dapat terjadi walaupun keseluruhan pasar tenaga kerja seimbang. Sebagai contoh, ketika angka penurunan tinggi atau ketika harga upah minimum sedang tinggi kelompok tertentu keluar dari angkatan tenaga kerja. Pengangguran cyclical terjadi selama masa resesi, ketika pekerjaan menurun sebagai akibat dari ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan agregat.

2.4.3 Dampak Pengangguran

Dampak dari pengangguran berimbas pada menurunnya tingkat perekonomian Negara, berdampak pada ketidakstabilan politik, berdampak pada para investor, dan pada social dan mental. Banyak sekali dampak yang ditimbulkan dari pengangguran. Beberapa dampak yang timbul oleh pengangguran :

1. **Ditinjau dari segi Ekonomi Pengangguran akan meningkatkan jumlah kemiskinan. Karena banyaknya yang menganggur berdampak rendahnya pendapatata ekonomimereka. sementara biaya hidup terus berjalan. Ini akan**

¹³Ibid, hal 366

membuat mereka tidak dapat mandiri dalam menghasilkan finansial untuk kebutuhan hidup para pengangguran.

2. Ditinjau dari segi sosial, dengan banyaknya pengangguran yang terjadi maka akan meningkatnya jumlah kemiskinan, dan banyaknya pengemis, gelandangan, serta pengamen. Yang dapat mempengaruhi terhadap tingkat kriminal, karena sulitnya mencari pekerjaan, maka banyak orang melakukan tindak kejahatan seperti mencuri, merampok, dan lain-lain untuk memenuhi kehidupan mereka.
3. Ditinjau dari segi mental, dengan banyaknya pengangguran maka rendahnya kepercayaan diri, keputusan asa, dan akan menimbulkan depresi.
4. Ditinjau dari segi politik maka akan banyaknya demonstrasi yang terjadi. Yang akan membuat dunia politik menjadi tidak stabil, banyaknya demonstrasi para serikat kerja karena banyaknya pengangguran yang terjadi.
5. Ditinjau dari segi keamanan, banyaknya pengangguran membuat para penganggur melakukan tindak kejahatan demi menghidupi perekonomiannya, seperti merampok, mencuri, menjual narkoba, tindakan penipuan.
6. Banyaknya pengangguran juga dapat meningkatkan Pekerja Seks komersial dikalangan muda, karena demi menghidupi ekonominya
7. Banyaknya dampak pengangguran yang timbul, menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat untuk segera menanggulangi jumlah pengangguran yang terjadi. Pemerintah harus meningkatkan kegiatan ekonomi di Indonesia. Setiap daerah harus mampu mandiri dalam meningkatkan laju perekonomiannya.¹⁴

2.4.4 Penyebab Pengangguran

Menjadi pengangguran bukanlah keinginan seseorang, namun keadaanlah yang terkadang memaksa mereka. Berikut beberapa penyebab terjadinya pengangguran :

1. **Penduduk relatif banyak sedangkan kesempatan kerja/lapangan kerja relatif rendah. Jumlah penduduk yang cukup tinggi tetapi tidak diimbangi dengan lapangan kerja maka jumlah angkatan kerja tidak semua tertampung dalam dunia kerja**

¹⁴Riska Franita, "Analisa Pengangguran Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 1 Desember 2016, Hal 90

2. pendidikan dan keterampilan rendah, tidak dibutuhkan oleh pihak badan usaha karena dengan pendidikan yang rendah dan keterampilan yang rendah tidak akan meningkatkan produktifitas kerja dan hasil produksi.
3. teknologi yang semakin maju yang belum seimbang oleh kemampuan manusia, tidak akan diimbangi dengan kemampuan manusia untuk menguasai maka banyak badan usaha hanya menerima yang mampu menguasai teknologi tersebut. Bagi yang tidak menguasai teknologi tersebut akan tersingkir dalam persaingan kerja,
4. pengusaha yang selalu ingin mengejar keuntungan dengan cara melakukan penghematan seperti penerapan rasionalisasi. Pengusaha hanya menerapkan berfikir rasional sehingga tenaga kerja dipaksa untuk bekerja seoptimal mungkin untuk mengejar target. Apabila tenaga kerja tidak bekerja sesuai dengan target maka tenaga kerja tersebut tidak diperlukan lagi.
5. adanya lapangan kerja yang dipengaruhi oleh musim, dapat menimbulkan pengangguran seperti pertanian, perkebunan. Setelah masa menanam selesai maka banyak tenaga kerja tinggal menunggu hasilnya. Untuk menunggu hasil mereka kebanyakan menganggur dan akan bekerja kembali apabila nanti musim panen telah tiba.¹⁵

2.4.5 Hubungan Pengangguran Terhadap Kemiskinan

Kemiskinan terjadi karena tidak adanya kemampuan seseorang atau beberapa orang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya yang terdiri atas kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Ketidakmampuan seseorang memenuhi kebutuhan pokok tersebut dapat disebabkan oleh pengangguran, yang sering disebut-sebut sebagai penyebab utama kemiskinan. Pengangguran dapat terjadi karena ketersediaan lapangan pekerjaan yang minim dibandingkan banyaknya jumlah penduduk usia kerja (berusia 15 tahun atau lebih).

“Keterkaitan antara pengangguran dengan kemiskinan ini sangat erat sekali. Seseorang yang menganggur tentunya tidak akan mendapatkan pendapatan. Tingkat kemiskinan ini akan bergerak mengikuti tingkat pengangguran. Apabila tingkat pengangguran terus meningkat, maka otomatis tingkat kemiskinan juga akan meningkat dan ketika tingkat pengangguran menurun, maka tingkat kemiskinan juga akan menurun”.¹⁶

¹⁵Naf’an, *Ekonomi Makro*, Cetakan Ke 1, Yogyakarta : Graha Ilmu, Tahun 2014, Hal 132

Maka, jika masyarakat sudah bekerja pasti masyarakat atau orang tersebut berkecukupan atau kesejahteraannya tinggi, namun di dalam masyarakat ada juga yang belum bekerja atau menganggur, pengangguran secara otomatis akan mengurangi kesejahteraan suatu masyarakat yang secara otomatis juga akan mempengaruhi tingkat kemiskinan.

Efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan kemiskinan. Apabila pengangguran di suatu negara sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk bagi kepada kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang¹⁷

Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan kemiskinan dan peluang untuk mendapatkan pekerjaan menjadi sedikit dan terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan.

2.5 Indeks Pembangunan Manusia

IPM merupakan variabel yang mencerminkan tingkat pencapaian kesejahteraan penduduk atas layanan dasar bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. IPM dibentuk berdasarkan empat indikator yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan kemampuan daya beli. Paradigma pembangunan yang sedang berkembang saat ini adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan pembangunan manusia yang dilihat dengan tingkat kualitas hidup manusia di tiap-tiap negara. Satu tolak ukur yang digunakan dalam melihat kualitas hidup manusia adalah indeks pembangunan manusia (IPM) yang diukur melalui kualitas tingkat pendidikan, kesehatan dan ekonomi (daya beli). Melalui peningkatan ketiga indikator tersebut diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas hidup manusia.

¹⁷I Komang Agus Adi Putra dan Sudarsana Arka, "Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Kesempatan Kerja, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali", dalam, **Jurnal ekonomi Pembangunan Universitas Udayana**, vol.7, no.3 Maret 2018, hal 422

Menurut UNDP (*The United Nations Development Program*), pembangunan manusia merupakan proses perluasan pilihan bagi penduduk (*a process of enlarging the people's choices*) dengan tujuan utama menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Pencapaian tujuan ini sangat bergantung pada empat hal pokok, yaitu produktivitas (*productivity*), pemerataan (*equity*), kesinambungan (*sustainability*), dan pemberdayaan (*empowerment*).¹⁸

2.5.1 Manfaat Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi salah satu indikator penting dalam melihat sisi lain dari pembangunan. Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan Manfaat penting IPM adalah sebagai berikut :

1. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya pembangunan kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).
2. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.
3. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alat ukur penentu Dana Alokasi Umum (DAU).¹⁹

Konsep Pembangunan Manusia yang dikembangkan oleh perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menetapkan peringkat kinerja pembangunan Indonesia pada skala 0 – 100 artinya semakin rendah nilai IPM suatu wilayah/negara berarti semakin lemah dan tertinggal pembangunan wilayah/negara tersebut dan sebaliknya apabila nilai IPM suatu wilayah tinggi berarti semakin kuat dan maju pembangunan wilayah/negara tersebut.

Berdasarkan kategorinya menurut Prima Sugmaraga IPM dapat dibagi menjadi 4 kategori yaitu :

1. **Tinggi : IPM lebih dari 80,0**

2. Menengah atas: IPM antara 66,0-79,9
3. Menengah bawah : IPM antara 50,0-65,9
4. Rendah : IPM kurang dari 50,0²⁰

2.5.2 Hubungan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan

IPM yang merupakan alat ukur bagikualitaspembangunan manusia,menjadi variabel penting bagi suatu Negara dalammenentaskan kemiskinan.Dalam menentaskan kemiskinan peranan pemerintah sangatlah penting.Pentingnya peranan dari pemerintah terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (*human capital*), mendorongberbagai penelitian, dan pembangunan untuk meningkatkan produktivitas manusia.

Selanjutnya hubungan IPM dengan kemiskinan dijelaskan dalam penelitian prima sukmaraga bahwa :

“Kualitas sumber daya manusia juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya penduduk miskin.Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari indeks kualitas hidup/indeks pembangunan manusia. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Produktivitas yang rendah berakibat pada rendahnya perolehan pendapatan. Sehingga dengan rendahnya pendapatan menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin”²¹

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa IPM merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kemiskinan, dimana IPM berpengaruh negatif yang apabila IPM meningkat maka kemiskinanakan mengalami penurunan.

Dengan demikian IPM merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kemiskinan. Dapat dikatakan bahwa jika suatu daerah atau negara memiliki tingkat IPM yang tinggi maka tingkat kemiskinan akan rendah karena masyarakat di daerah tersebut memiliki kemampuan yang baik secara fisik maupun intelektualitas sehingga memungkinkan untuk memperoleh pekerjaan yang baik.

²⁰Prima Sukmaraga, “Analisis Ipm, Pdrb Perkapita, Dan Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Tengah”, Semarang : Universitas Diponegoro, 2011, Hal 31 (Skripsi Belum Diterbitkan).

²¹Ibid, hal. 8

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Riana Puji Lestari dengan Judul Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran, Dan Produk Domestik Regional Broto Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Lampung dalam perspektif ekonomi islam tahun 2011-2015. Penelitian ini menggunakan metode analisis linier berganda dengan metode Ordinary Least Square (OLS). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa “Variabel Indeks Pembangunan Manusia, pengangguran, dan Produk Domestik Bruto secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di provinsi lampung”²².

Analisis pengaruh Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran, Dan Produk Domestik Regional Broto Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Lampung dalam perspektif ekonomi islam tahun 2011-2015 oleh Riana Puji Lestari. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier panel data dengan metode *FEM*. “Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa IPM berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan”.

Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Indonesai Tahun 2014-2017 (Studi Kasus :34 Propinsi) oleh Amirudin. “Variabel independen dalam penelitian ini, yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tingkat pengangguran secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap Kemiskinan 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2014-2017”²³.

Penelitian yang dilakukan oleh Rendy Bayu Adha, dengan judul” Pengaruh Belanja Daerah Dan Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Kemiskinan (Studi Kasus Pada Kabupaten/ Kota Di Provinsi Lampung)” penelitian ini menggunakan model regresi data panel. Penelitian ini

²²Riana Puji Lestari, op. cit, hal, 90

²³Amirudin, “**Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2014-2017 (Studi Kasus: 34 Provinsi)**”, Jakarta :Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019 (skripsi tidak diterbitkan). Hal: 71

akan menggunakan data per kapita untuk belanja daerah, hal ini dilakukan untuk menetralkan perbedaan jumlah penduduk antar daerah di kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Selain itu, karena pengaruh belanja daerah pada tahun t tidak langsung berpengaruh pada 40 tahun t tersebut melainkan diperlukan jeda waktu, sehingga akan dipakai model lag.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa :

Secara keseluruhan, variabel rasio kemandirian daerah (MAND) memberikan pengaruh terbesar dalam penurunan kemiskinan pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Selanjutnya, Belanja Daerah urusan pendidikan memberikan pengaruh terbesar kedua dalam penurunan kemiskinan. Berbeda dengan hipotesis, variabel belanja urusan kesehatan, belanja urusan pekerjaan umum, belanja urusan pertanian dan rasio keserasian belanja modal tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.²⁴

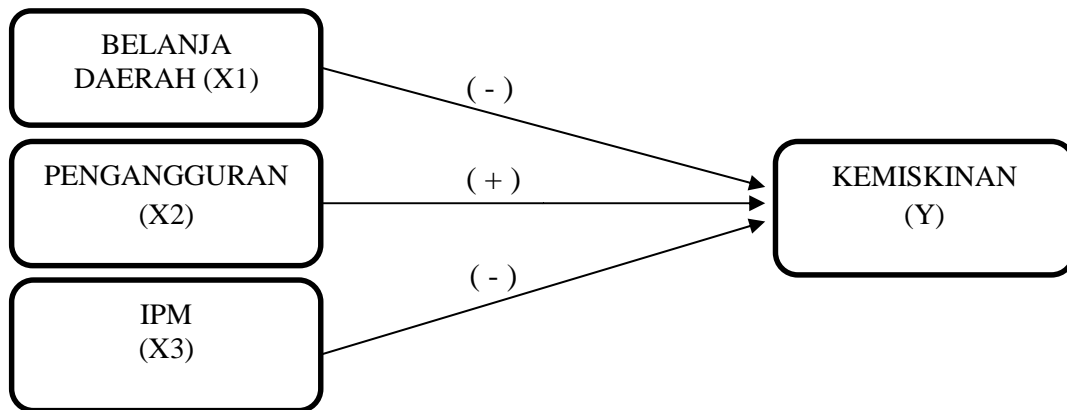
2.7 Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran teoritis merupakan pola pikir teori yang didasarkan pada teori-teori yang dibahas serta dikaitkan dengan beberapa hasil penelitian terdahulu. Untuk memperjelas pemikiran dalam penelitian ini.

Belanja daerah, pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia variabel independen, bersama-sama dengan kemiskinan sebagai variabel dependen akan di regresikan untuk mendapatkan tingkat signifikannya. Dengan hasil regresi tersebut diharapkan mendapatkan tingkat signifikan setiap variabel independen dalam mempengaruhi kemiskinan di kabupaten labuhanbatu. Selanjutnya tingkat signifikansi setiap variabel independen tersebut diharapkan

²⁴Rendy Bayu Adha, ” Pengaruh Belanja Daerah Dan Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Kemiskinan (Studi Kasus Pada Kabupaten/ Kota Di Provinsi Lampung)”, Lampung : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung Bandar Lampung, 2016 (skripsi tidak diterbitkan). Hal 71

mampu memberikan gambaran kepada pemerintah dan pihak-pihak terkait mengenai kemiskinan di labuhanbatu. Secara skema kerangka pemikiran dapat dilihat sebagai berikut :



Gambar 2.1.Kerangka Pemikiran

2.8 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang ada dimana kebenarannya masih perlu dikaji dan diteliti melalui data yang terkumpul. Pada dasarnya hipotesis merupakan suatu pernyataan tentang hakikat dan hubungan antara variabel – variabel yang dapat diuji secara empiris. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru disarankan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Berdasarkan latar belakang masalah dengan landasan teoretis maka penulis merumuskan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : Belanja Daerah berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu

H2 : Pengangguran berpengaruh positif terhadap Kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu

H3 : IPM berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dilakukan di kabupaten labuhanbatu, dengan menganalisa pengaruh belanja daerah, pengangguran, dan indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di kabupaten labuhanbatu.

3.2 Jenis Dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang bersumber dari Badan Pusat Statistika (BPS) kabupaten Labuhanbatu tahun 2006-2018. Data yang dibutuhkan antara lain adalah data yang berkaitan dengan kemiskinan, belanja daerah, pengangguran, dan indeks pembangunan manusia.

3.3 Analisi Data

3.3.1 Model Ekonometrik

Model yang digunakan untuk menganalisa pengaruh belanja daerah, pengangguran dan indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di kabupaten Labuhan batu tahun 2006-2017 adalah model ekonometrik.

Penggunaan model ekonometrik dalam analisis struktural dimaksudkan untuk mengukur besaran kuantitatif hubungan variabel-variabel ekonomi. Analisis

3.3.2 Pendugaan Model Ekonometrik

Model yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis statistik berupa regresi linier berganda. Model persamaannya regresi linier berganda (persamaan regresi sampel) adalah sebagai berikut:

$$Y_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 X_1 + \hat{\beta}_2 X_2 + \hat{\beta}_3 X_3 + \varepsilon_i; i=1,2,3,\dots,n$$

Dimana :

Y	=	Kemiskinan (jiwa)
$\hat{\beta}_0$	=	Intersep
$\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2, \hat{\beta}_3$	=	Koefisien Regresi (Statistik)
X_1	=	Belanja Daerah (milyar rupiah)
X_2	=	Pengangguran (jiwa)
X_3	=	Indeks Pembangunan Manusia (%)
ε_i	=	Galat (Error Term)

3.3.3 Pengujian Hipotesis

3.3.3.1 Uji Secara Individu (Uji-t)

1. Belanja Daerah (X_1)

$H_0 : \beta_1 = 0$ Artinya, Belanja Daerah tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.

$H_1 : \beta_1 < 0$ Artinya, Belanja Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Rumus untuk mencari t_{hitung} adalah : $t_h = \frac{\hat{\beta}_1 - \beta_1}{S(\hat{\beta}_1)}$

$\hat{\beta}_1$: koefisien regresi (statistik)

β_1 : parameter

$S(\hat{\beta}_1)$: simpangan baku

Apabila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 di tolak dan H_1 diterima, artinya Belanja Daerah secara parsial berpengaruh negative terhadap kemiskinan di Labuhanbatu. Kemudian jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya Belanja Daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Labuhanbatu.

2. Pengangguran (X2)

$H_0 : \beta_2 = 0$ Artinya, pengangguran tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.

$H_1 : \beta_2 > 0$ Artinya, pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Rumus untuk mencari t_{hitung} adalah : $t_h = \frac{\hat{\beta}_2 - \beta_2}{S(\hat{\beta}_2)}$

$\hat{\beta}_2$: koefisien regresi (statistik)

β_2 : parameter

$S(\hat{\beta}_2)$: simpangan baku

Apabila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 di tolak dan H_1 diterima, artinya Pengangguran secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Labuhanbatu. Kemudian jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya Pengangguran secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Labuhanbatu.

3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (X3)

$H_0 : \beta_3 = 0$ Artinya Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.

$H_1 : \beta_3 < 0$ Artinya, Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Rumus untuk mencari t_{hitung} adalah : $t_h = \frac{\hat{\beta}_3 - \beta_3}{S(\hat{\beta}_3)}$

$\hat{\beta}_3$: koefisien regresi (statistik)

β_3 : parameter

$S(\hat{\beta}_3)$: simpangan baku

Apabila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 di tolak dan H_1 diterima, artinya Indeks Pembangunan Manusia secara parsial berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Labuhanbatu. Kemudian jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya Indeks Pembangunan manusia secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Labuhanbatu.

Koefisien regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Uji t dapat dilakukan dengan membandingkan nilai *probability* dengan taraf signifikannya. Apabila nilai Prob. $< \alpha$ maka koefisien variabel tersebut signifikan mempengaruhi variabel terikat dan sebaliknya. Pengujian terhadap hasil regresi dilakukan dengan menggunakan uji t pada derajat keyakinan 95% atau $\alpha = 5\%$ dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jika nilai *probability* t-statistik $< 0,05\%$ maka H_0 ditolak H_1 diterima
2. Jika nilai *probability* t-statistik $> 0,05\%$ maka H_0 diterima H_1 ditolak

3.3.3.2 Uji Secara Simultan (Uji F)

Uji F (Uji simultan) digunakan untuk menguji apakah secara bersama-sama variabel bebas dapat mempengaruhi variabel tak bebas.

Adapun langkah-langkah pengujian uji F sebagai berikut :

a. Membuat hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_1) sebagai berikut :

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$ berarti variabel bebas secara serempak (keseluruhan) tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

$H_1 : \beta_i \neq 0$, $i = 1, 2, 3$, berarti variabel bebas secara serempak/keseluruhan berpengaruh terhadap variabel terikat.

b. Mencari nilai F hitung ada nilai kritis F statistik dari tabel F. Nilai kritis F berdasarkan dan

df untuk *numerator* (k-1) dan df untuk *denominator* (n-k).

Rumus untuk mencari F_{hitung} adalah :

$$F_{hitung} = \frac{JKR(k-1)}{JKG(n-k)}$$

JKR : Jumlah Kuadrat Regresi

JKG : Jumlah Kuadrat Galat

k : Banyaknya koefisien regresi

n : Banyaknya sampel

Apabila nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima, artinya variabel bebas secara bersama-sama (simultan) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Sebaliknya, bila nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 di tolak, artinya secara bersama-sama (simultan) variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

3.3.4 Uji Keباikan-Suai : Koefisien Determinasi (R^2)

Uji kebaikan-suai bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi linier berganda yang digunakan sudah sesuai untuk menjelaskan hubungan antara variabel takbebas dengan variabel-variabel bebas. Untuk melihat kebaikan-suai model yang digunakan koefisien determinasi R^2 untuk mengukur seberapa besar keragaman variabel takbebas yang dapat dijelaskan oleh keragaman variabel-variabel bebas. Nilai koefisien determinasi R^2 adalah $0 \leq R^2 \leq 1$; $R^2 \rightarrow 1$ artinya semakin angkanya mendekati 1 maka semakin baik garis regresi karena mampu menjelaskan data aktualnya.²⁵

3.3.5 Uji Penyimpangan Asumsi Klasik

3.3.5.1 Multikolinieritas

²⁵ Agus Widarjono, *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*, Edisi 4, Yogyakarta, UPP STIM YKPN, 2013, Hal 26

Menurut Agus Widarjono "Hubungan linier antara variabel independen di dalam regresi berganda dalam persamaan disebut multikolinearitas"²⁶. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen.

Uji Multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang kuat (korelasi yang kuat) di antara variabel bebas. Variabel-variabel bebas yang mempunyai hubungan tidak mungkin dianalisis secara terpisah pengaruhnya terhadap variabel terikat. Pengaruhnya terhadap nilai taksiran :

- a. Nilai-nilai koefisien mencerminkan nilai yang benar.
- b. Karena galat bakunya besar maka kesimpulan tidak dapat diambil melalui uji-t.
- c. Uji-t tidak dapat dipakai untuk menguji keseluruhan hasil taksiran.
- d. Tanda yang dihadapkan pada hasil taksiran koefisien akan bertentangan dengan teori.

Salah satu cara untuk mendeteksi gejala multikolinearitas adalah dengan melihat VIF (*Variance Inflation Factor*), bila nilai $VIF \leq 10$ dan $Tol \geq 0.1$ maka dianggap tidak ada pelanggaran multikolinieritas, namun bila sebaliknya $VIF \geq 10$ dan $Tol \leq 0.1$ maka dianggap ada pelanggaran multikolinearitas. Untuk mengetahui seberapa kuat atau seberapa parah kolinearitas (korelasi) antar sesama variabel bebas maka dapat dilihat dari matriks korelasi. Bila nilai matriks $> 0,95$ maka kolinearitasnya serius (tidak dapat ditolerir). Namun bila sebaliknya nilai matriks $< 0,95$ maka kolinearitas dari sesama variabel bebas masih dapat ditolerir. Cara lain yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinearitas adalah dengan menggunakan cara regresi sekuensial antara sesama variabel bebas. Nilai R^2 sekuensial dibandingkan dengan nilai R^2 pada regresi model utama. Jika R^2 sekuensial lebih besar daripada nilai R^2 pada model utama maka terdapat multikolinearitas.

3.3.5.2 Autokorelasi

²⁶Ibid, Hal 101

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara galat (kesalahan pengganggu, *disturbance error*) pada periode waktu t dengan galat pada periode waktu $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya.

Ada beberapa cara untuk menguji keberadaan serial autokorelasi, yaitu dengan uji: Durbin Watson (uji $D - W$). "Uji Durbin-Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (*first order autocorrelation*) dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel *lag* di antara variabel independen"²⁷. Selain itu untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dapat juga dilakukan Uji Run.

a. Uji Durbin-Watson

Uji Durbin-Watson dirumuskan sebagai berikut:

Dengan jumlah sampel dan jumlah variabel tidak bebas tertentu diperoleh dari nilai kritis d_l dan d_u dalam tabel distribusi Durbin-Watson untuk berbagai nilai k . Secara umum bisa diambil patokan:

1. Angka $D - W$ di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif.
2. Angka $D - W$ di antara -2 sampai $+2$ berarti tidak ada autokorelasi.
3. Angka $D - W$ di atas $+2$ berarti ada autokorelasi negatif.

b. Uji Run

Untuk mendeteksi lebih lanjut ada atau tidak adanya autokorelasi dalam model yang digunakan dapat juga digunakan uji Run. Uji Run merupakan bagian dari statistika

²⁷ Imam Gozali, **Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23**, Edisi 7, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2013, Hal 108

nonparametrik dapat digunakan untuk menguji apakah antar galat terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar galat (residu atau kesalahan pengganggu) tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa galat adalah acak atau random. "Run test digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak (sistematis)".²⁸⁾ Cara yang digunakan dalam uji Run adalah sebagai berikut :

1. H_0 : Galat (res_1) random (acak)
2. H_1 : Galat (res_1) tidak random

3.3.5.3 Normalitas

Sesuai teorema Gauss Markov :

$$Y_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 X_{1i} + \hat{\beta}_2 X_{2i} + \dots + \varepsilon_i$$

1. $\varepsilon_i \sim N(0, \sigma^2)$ Apakah galat (distribusi error) menyebar normal atau tidak
2. ε_i tidak terjadi autokorelasi

Asumsi klasik yang lain dalam pendugaan dengan menggunakan penduga OLS adalah kenormalan. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel galat atau residu memiliki sebaran normal. Penggunaan uji t dan f mengasumsikan bahwa nilai galat menyebar normal. "Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil."²⁹⁾ untuk mendeteksi apakah galat menyebar normal atau tidak digunakan analisis grafik dan uji statistik.

²⁸⁾ **Ibid**, hal. 116

²⁹⁾ **Ibid**, Hal 154

a. Analisis Grafik

Untuk menguji normalitas galat dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antar data pengamatan dengan sebaran yang mendekati sebaran normal. Caranya adalah dengan melihat sebaran peluang normal yang membandingkan sebaran kumulatif dari ebaran normal. Sebaran normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan diagram data galat akan dibandingkan dengan garis diagonal tersebut. Jika sebaran data galat atau residu normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonal.

b. Uji kemencengan dan keruncingan

Untuk menguji apakah galat atau residu menyebar normal dengan menggunakan grafik dapat memberikan kesimpulan yang tidak tepat kalau tidak hati-hati secara visual. Oleh sebab itu dilengkapi dengan uji statistik, yaitu dengan melihat nilai kemencengan atau penjururan (skewness) dan keruncingan (kurtosis) dari sebaran galat. Menurut Ghozali nilai z statistik untuk kemencengan dan nilai z keruncingan dapat dihitung dengan rumus, yaitu sebagai berikut :

$$Z_{skewness} = \frac{skewness}{\frac{6}{n}} \text{ dan } Z_{kurtosis} = \frac{kurtosis}{\frac{24}{n}}, \text{ dimana } n \text{ adalah ukuran sampel.}$$

c. Uji-One-Sample-Kolmogorov-Smirnov

Menurut Ghozali untuk menguji apakah sebaran galat pendugaan regresi menyebar normal atau tidak, dapat digunakan uji statistik lain yaitu uji statistik nonparametrik Kolmogrof-Smirnov (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis sebagai berikut :

H_0 : Data galat (residu) menyebar normal

H_1 : Data galat tidak menyebar normal.

3.4 Definisi Operasional Variabel

1. Kemiskinan (Y)

kemiskinan merupakan total banyaknya rumah tangga yang kurang mampu di kabupaten labuhanbatu 2006-2017. Dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk miskin yang ada di kabupaten labuhanbatu. Sumber data diperoleh dari BPS dan satuannya ribuan jiwa.

2. Belanja Daerah (X1)

Belanja daerah adalah kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Provinsi atau Kabupaten/Kota. Dalam penelitian ini adalah total belanja daerah yang ada di kabupaten Labuhanbatu tahun 2006-2017.

3. Jumlah pengangguran (X2)

pengangguran adalah seorang yang sudah termasuk dalam golongan angkatan kerja, tetapi belum mendapatkan pekerjaan atau sedang mencari kerja. Dalam penelitian ini adalah tingkat pengangguran yang ada di Kabupaten Labuhanbatu tahun 2006-2017. Sumber data diperoleh dari BPS dan satuannya dalam ribu jiwa.

4. Indeks Pembangunan Manusia (X3)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / *Human Development Index* (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara di seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah kabupaten labuhanbatu adalah kabupaten maju, dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data Indeks Pembangunan Manusia yang ada di Kabupaten Labuhanbatu tahun 2006-2017. Sumber data diperoleh dari BPS dan satuannya dalam persen.

